

Judul : Penyalahgunaan Wewenang Polisi Jadi Sorotan
Tanggal : Rabu, 12 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

REFORMASI POLRI

Penyalahgunaan Wewenang Polisi Jadi Sorotan

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto menjadi harapan berbagai pihak untuk memperbaiki kepolisian. Sejumlah isu terkait Polri, mulai dari penangkapan aktivis, kematian Farhan dan Reno, hingga masalah perekrutan anggota dan penyalahgunaan wewenang menjadi sorotan terkait kinerja institusi penegakan hukum ini.

Presiden Prabowo Subianto melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang terdiri atas 10 tokoh, di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (7/11/2025). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie diangkat menjadi ketua komisi.

Adapun anggotanya terdiri dari Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo; Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ilza Mahendra; Mendagri Tito Karnavian; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Wamenko Hukum Otto Hasibuan; Penasihat Khusus Presiden Ahmad Dofiri; mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Aziz dan Jenderal (Purn) Badrodin Haiti; serta mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo, berharap orang-orang yang ditunjuk Prabowo ini bisa bekerja dengan baik. Mereka diharapkan mampu menerjemahkan keinginan Presiden untuk mengubah institusi Polri ke arah yang lebih baik.

"Tentu lebih spesifik terhadap hal-hal yang ingin diperbaiki atau dikoreksi, apakah berkaitan dengan struktural, instrumental, atau kultural yang ada di institusi Polri. Ya, kita beri kesempatan kepada orang-orang yang sudah ditun-

juk untuk bekerja bersama tim yang dibentuk Bapak Kapolri di internal," paparnya di Jakarta, Selasa (11/11).

Perbaikan ini, kata Rudianto, salah satunya adalah terkait kewenangan penegakan hukum. Ini juga terkait penangkapan para aktivis oleh Polri sesuai demonstrasi besar pada Agustus 2025 yang menjadi sorotan publik.

"Hal yang dirumuskan sekarang adalah hal-hal yang dikritik dan perlu diperbaiki. Salah satunya adalah terkait kewenangan penegakan hukum. Nah, yang banyak disoroti publik sekarang, kan, seperti penangkapan-penangkapan ini. Jadi, yang kita mau adalah penegakan hukum yang tidak melanggar hukum, ya, kan?" ujarnya.

Kematian Farhan dan Reno

Anggota Komisi III DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdullah, menyebut, salah satu rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri ini adalah terkait kematian Muhammad Farhan Hamid dan Reno Sastrawijaya. Jenazah keduanya ditemukan di Kwitang, Jakarta, setelah dinyatakan hilang setelah demonstrasi besar pada Agustus 2025.

Bahkan, Abdullah mendorong dibentuknya tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen yang melibatkan berbagai unsur untuk mencari kebenaran di balik kasus ini. Dia yakin temuan-temuan yang ada akan memberikan masukan penting untuk Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Riset Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana berpesan, reformasi kepolisian

Kasus-kasus yang ada di kepolisian itu harus dapat diidentifikasi secara utuh.

Arif Maulana

harus dimulai dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan mendasar kepolisian yang tampak dari berbagai kasus yang terjadi di kepolisian selama ini.

Kasus yang dimaksud adalah praktik militeristik, penyalahgunaan kekuasaan berlebihan, korupsi, impunitas, besarnya kewenangan, dan ketiadaan pengawasan yang efektif. Kasus-kasus tersebut harus dilihat secara komprehensif, baik dari sisi regulasi kewenangan kepolisian, kelembagaan, anggaran, maupun kultur kepolisian.

"Kasus-kasus yang ada di kepolisian itu harus dapat diidentifikasi secara utuh. Apa masalah yang harus diperbaiki dan dicarikan solusinya sesuai dengan cita-cita reformasi yang menginginkan polisi jadi polisi sipil yang demokratis, humanis, dan profesional," tutur Arif.

Perekrutan

Arif juga menyebut isu terkait perekrutan dan seleksi adalah salah satu masalah yang tidak bisa dipisahkan dari masalah mendasar lainnya sehingga membutuhkan solusi komprehensif. Isu ini juga sebelumnya disebutkan oleh Jimly setelah pelantikan.

Jimly menyatakan, masalah perekrutan menjadi salah satu isu perbaikan internal akan di-

bahas bersifat *quick win*, salah satunya perekrutan di tubuh Polri. Rekomendasi itu akan disampaikan kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, rekomendasi yang bersifat kebijakan fundamental dan strategis, seperti peraturan perundang-undangan, akan diserahkan langsung kepada Presiden. Semua rekomendasi ini, kata Jimly, berdasarkan aspirasi dari publik yang akan dijarah secara maraton selama tiga bulan ke depan.

Meski demikian, Arif meminta komisi tidak hanya fokus kepada isu-isu tertentu, seperti perekrutan, tetapi juga melakukan identifikasi masalah secara utuh. Dengan demikian, komisi bisa mencari solusi sesuai dengan cita-cita reformasi yang menginginkan polisi menjadi polisi sipil yang demokratis, humanis, dan profesional.

"Harusnya diidentifikasi dulu secara tepat masalah mendasarnya. Jangan sampai nanti masalahnya hanya diidentifikasi di rekrutmen," tuturnya.

Arif khawatir masalah mendasar—seperti besarnya kewenangan kepolisian dalam berbagai fungsi, mulai dari keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, hingga layanan masyarakat—justru kemudian luput dari evaluasi komite. Padahal, hal itu sebenarnya yang perlu mendapatkan pengawasan efektif serta mendapatkan perhatian.

"Jika memang mau memulai dari masalah rekrutmen, menurut saya, harus diaudit dahulu selama ini rekrutmennya seperti apa. Apa masalahnya? Apakah ada korupsi, praktik pendidikan yang militeristik, standar rekrutmen yang rendah, serta tidak adanya pengawasan transparansi akuntabilitas dalam rekrutmen," kata Arif. (DEA/RTG)